

ABSTRAK

Penjatuan Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Berita Hoax Di Media Sosial (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 115/PUU-XXII/2024)

Oleh
Anita Seni Guinta
NIM: 22310075

Tindak pidana menyebarkan berita bohong di media sosial yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat yang sangat luas dan sulit dibedakan dalam ruang digital dan ruang fisik yang diatur dalam Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 45A ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Permasalahan adalah: Bagaimana pertimbangan Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon? Apa akibat hukum yang timbul dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon dan untuk mengetahui akibat hukum yang timbul dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut yang berguna secara teori dan praktis. Penelitian ini adalah penelitian normatif yang bersifat deskriptif. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pertimbangan Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon dan akibat hukum yang timbul dari putusan Mahkamah Konstitusi dan variabel terikat dalam penelitian ini adalah putusan hakim Mahkamah Konstitusi. Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah bahan primer, bahan sekunder dan tersier yang akan dianalisa secara normatif kualitatif.

Berdasarkan pada hasil penelitian menunjukan bahwa: *Pertama*, Pertimbangan Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon adalah: Adanya hak konstitusional pemohon yang dirugikan, Adanya upaya kriminalisasi dan dilaporkan ke Kantor Kepolisian Resor Tapanuli Selatan, adanya pembatasan terhadap kebebasan berpendapat yang mengkritik kebijakan pemerintah dan adanya ketidakjelasan dan ketidakpastian dalam penegakan hukum. *Kedua*, Akibat hukum yang timbul dari putusan Mahkamah Konstitusi adalah: Pembatasan penerapan tindak pidana penyebaran berita bohong yang menimbulkan kerusuhan di ruang digital, memberikan kepastian hukum dan hak kebebasan berpendapat, putusan Mahkamah Konstitusi mengikat semua warga negara dan Mahkamah Konstitusi sebagai legislator negative. Berdasarkan pada kesimpulan di atas dapat disarankan: *Pertama*, bagi DPR sebagai lembaga negara pembentuk undang-undang perlu merevisi Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 45A ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik agar tidak terjadi kekosongan, *Kedua*, Mahkamah Konstitusi harus tetap memberikan putusan yang mengedepankan hak warga negara.

Kata Kunci: Menyebarkan Berita Hoax, Media Sosial, Putusan Mahkamah Konstitusi

ABSTRACT

Constitutional Court Decision on Hoax News on Social Media (Study of Constitutional Court Decision Number: 115/PUU-XXII/2024)

By
Anita Seni Guinta
Student ID: 22310075

The crime of spreading hoax news on social media which cause widespread public unrest and is difficult to distinguish between digital and physical space is regulated in Article 28 paragraph (3) and Article 45A paragraph (3) of Law Number 1 of 2024 concerning the Second Amendment to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transaction, as decided by the Constitutional Court. The problem is: What were the consideration of the Constitutional Court in granting the applicant petition? What are the legal consequence of the Constitutional Court decision? The purpose of this study is to determine the consideration of the Constitutional Court in granting the applicant petition and to determine the legal consequence arising from the Constitutional Court decision which are useful theoretically and practically. This research is a descriptive normative study. The independent variables in this study are the Constitutional Court consideration in granting the applicant petition and the legal consequence arising from the Constitutional Court decision. The dependent variable in this study is the decision of the Constitutional Court judges. The data obtained in this study are primary, secondary and tertiary material that will be analyzed qualitatively and normatively.

Based on the research result it show that: First, the Constitutional Court consideration in granting the applicant petition are: The applicant constitutional right have been violated, there has been an attempt to criminalize the petition and it has been reported to the South Tapanuli Police Station, there are restriction on freedom of expression that criticizen government police and there is ambiguity and uncertainty in law enforcement. Second, the legal consequence arising from the Constitutional Court decision are: Limiting the application of criminal acts for spreading fake news that cause unrest in the digital space, providing legal certainty and the right to freedom of expression, the Constitutional Court decision is binding on all citizen and the constitutional court as a negative legislator. Based on the above conclusion, it can be suggested: First, the House of Representative (DPR), as a state institution that form law, need to revise Article 28 paragraph (3) and Article 45A paragraph (3) of Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transaction to avoid a vacuum. Second, the Constitutional Court must continue to issue decision that prioritize citizen right.

Keywords: The spreading hoax news, Social Media, Constitutional Court decision